

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/2/PBI/2003 tanggal 3 Februari 2003 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260), dipandang perlu menetapkan tata cara perizinan, pendaftaran ulang, dan pelaporan bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA), sebagai berikut :

I. UMUM

1. Bank Umum dalam Surat Edaran ini adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

2. Permohonan ...

2. Permohonan izin dan atau penyampaian laporan kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia dapat diajukan oleh pengurus atau pejabat Bank Umum sesuai dengan tingkat kewenangan dan atau kebijakan yang berlaku di masing-masing Bank Umum.
3. Perhitungan hari dalam hal penyampaian permohonan izin dan atau laporan yang diajukan kepada Bank Indonesia didasarkan pada hari kalender.
4. Perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan izin dan atau penyampaian laporan oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia dihitung sejak diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia.
5. Izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA yang diberikan kepada Bank Umum, melekat pada kantor pusat atau kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sehingga kegiatan usaha sebagai PVA tidak dapat dilakukan di tempat dan lokasi yang terpisah dengan kantor Bank Umum.
6. Kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum hanya dapat dilakukan apabila kantor cabang induknya telah memiliki izin usaha sebagai PVA.
7. Pendaftaran ulang atas izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia bagi PVA Bank Umum, yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003.

II. TATA CARA PERIZINAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA

A. Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa.

1. Tata cara perizinan sebagai PVA bagi Bank Umum bukan Bank Devisa diatur sebagai berikut :

a. Kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai PVA secara tertulis kepada Bank Indonesia.

b. Pengajuan permohonan izin usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan ke alamat sebagai berikut :

1) Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, sesuai dengan format pada **Lampiran 1a**, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait; atau

2) Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan format pada **Lampiran 1b**, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha sebagai PVA.

c. Bank ...

- c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa mengenai penolakan atau persetujuan permohonan izin usaha sebagai PVA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
- d. Bank Umum bukan Bank Devisa wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, Bank Umum bukan Bank Devisa tidak melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA maka persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dianggap batal.
- e. Bank Umum bukan Bank Devisa wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam huruf d, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dimulainya kegiatan usaha sebagai PVA ke alamat sebagai berikut :
 - 1) Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, sesuai dengan format pada **Lampiran 3a**, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dan Direktorat Pengelolaan Moneter; atau
 - 2) Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan format pada **Lampiran 3b**, dengan mengacu kepada pembagian

wilayah ...

wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dan Direktorat Pengelolaan Moneter.

- f. Izin usaha sebagai PVA yang diberikan kepada kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa berlaku pula bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
2. Tata cara pelaporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA oleh kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa yang telah memperoleh izin usaha sebagai PVA diatur sebagai berikut :
- a. Kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
 - b. Laporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan ke alamat sebagai berikut :
 - 1) Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, sesuai dengan format pada **Lampiran 4a**, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dalam hal kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank

Devisa yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

- 2) Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan format pada **Lampiran 4b**, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait apabila kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau kepada Kantor Bank Indonesia dimana kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tersebut berada,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha sebagai PVA.

- c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa mengenai penolakan atau persetujuan atas laporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak laporan secara lengkap diterima Bank Indonesia.
- d. Pembukaan kegiatan usaha sebagai PVA bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

Apabila ...

Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa tidak melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA maka penegasan yang diberikan oleh Bank Indonesia dianggap batal.

- e. Pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha PVA dalam huruf d, wajib dilaporkan sesuai dengan format pada **Lampiran 5a** [bagi Bank Umum bukan Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada angka II.A.2.b.1)] **atau Lampiran 5b** [bagi Bank Umum bukan Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada angka II.A.2.b.2)], selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dimulainya kegiatan usaha sebagai PVA ke alamat sebagaimana diatur dalam angka II.A.2.b.

B. Bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa.

Tata cara pelaporan kegiatan usaha sebagai PVA bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa diatur sebagai berikut :

1. Kantor pusat Bank Umum Devisa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

2. Laporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan ke alamat sebagai berikut :
- a. Bagi Bank Umum Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, laporan dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, sesuai dengan format pada **Lampiran 6a**, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dan atau Kantor Bank Indonesia setempat dalam hal kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Bagi Bank Umum Devisa yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, laporan dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan format pada **Lampiran 6b**, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait apabila kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa tersebut berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau kepada Kantor Bank Indonesia dimana kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tersebut berada,

selambat-lambatnya ...

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha sebagai PVA.

3. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada kantor pusat Bank Umum Devisa mengenai penolakan atau persetujuan atas laporan rencana kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak laporan permohonan diterima oleh Bank Indonesia.
4. Pembukaan kegiatan usaha sebagai PVA bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa tidak melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA maka persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dianggap batal.
5. Kantor pusat Bank Umum Devisa wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sesuai dengan format pada **Lampiran 7a** [bagi Bank Umum Devisa sebagaimana dimaksud pada angka II.B.2.a] **atau Lampiran 7b** [bagi Bank Umum Devisa sebagaimana dimaksud pada angka II.B.2.b], selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dimulainya kegiatan usaha sebagai PVA ke alamat sebagaimana diatur dalam angka II.B.2.

C. Bagi ...

- C. Bagi kantor cabang Bank Umum Devisa yang telah ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa menjadi Bank Umum Devisa yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tidak perlu mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

III. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA BAGI BANK UMUM BUKAN BANK DEVISA.

Permohonan pendaftaran ulang izin usaha sebagai PVA bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang telah memperoleh izin usaha sebagai PVA sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, diatur sebagai berikut :

1. Kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin usaha sebagai PVA secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan melampirkan Sertifikat Izin Usaha yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Dalam permohonan pendaftaran ulang, dicantumkan pula seluruh kantor dari Bank Umum bukan Bank Devisa baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor di bawah kantor cabang, yang telah melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia dimaksud.
2. Permohonan pendaftaran ulang izin usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan ke alamat sebagai berikut :
 - a. Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan,

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010 sesuai dengan format pada **Lampiran 8a**; atau

- b. Bagi Bank Umum bukan Bank Devisa yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan format pada **Lampiran 8b**, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**.
3. Batas waktu pendaftaran ulang izin usaha sebagai PVA selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2003.
4. Dalam hal kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak melaksanakan pendaftaran ulang izin usaha sebagai PVA sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka izin usaha sebagai PVA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa wajib mengembalikan asli sertifikat izin usaha sebagai PVA ke alamat sebagaimana diatur pada angka II.A.1.b.1) atau 2).

IV. TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA

1. Laporan Berkala

Kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA dan kantor pusat Bank Umum Devisa wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas setiap triwulan. Laporan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya, misalnya laporan triwulan I (Januari, Februari, Maret) disampaikan

selambat-lambatnya ...

selambat-lambatnya akhir April. Laporan berkala yang disampaikan kepada Bank Indonesia merupakan :

- a. Laporan konsolidasi kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang berikut kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum bukan Bank Devisa sesuai dengan format pada **Lampiran 9a**, atau
 - b. Laporan konsolidasi kegiatan usaha sebagai PVA dari masing-masing kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum Devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang devisa sesuai dengan format pada **Lampiran 9b**.
2. Laporan Khusus
- Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta kepada kantor pusat Bank Umum bukan Bank Devisa yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA dan kantor pusat Bank Umum Devisa, untuk menyampaikan laporan selain laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib disampaikan dengan benar, akurat dan ditandatangani oleh pengurus atau pejabat yang berwenang dengan alamat sebagai berikut :
- a. Bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010; atau
 - b. Bagi Bank Umum yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**.

V. LAIN-LAIN

1. Kantor Pusat Bank Umum wajib melaporkan secara tertulis mengenai penutupan atau penghentian kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor pusat atau kantor cabang atau kantor-kantor di bawah kantor cabang.
2. Laporan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disampaikan ke alamat sebagai berikut :
 - a. Bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, laporan dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, sesuai dengan format pada **Lampiran 10a**, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan; atau
 - b. Bagi Bank Umum yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, laporan dialamatkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan format pada **Lampiran 10b**, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada **Lampiran 2**,
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian kegiatan usaha sebagai PVA.
3. Penutupan kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang yang dilakukan bersamaan dengan penutupan kantor, pelaporannya dilakukan sesuai dengan tata cara penutupan kantor Bank yang berlaku.
4. Izin yang telah diperoleh dari Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak dilaksanakannya penghentian atau penutupan kegiatan usaha sebagai PVA.

VI. KETENTUAN ...

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/7/UOPM tanggal 17 Desember 1998 perihal Pedagang Valuta Asing dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN